

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMERANGI PERDAGANGAN MANUSIA

**Studi Kasus: Kontribusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina
Pada Tahun 2015**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.Sos) dalam Bidang
Hubungan Internasional



Oleh:

DYAN WAHYUNING TYAS

NIM. I72215028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
2019**

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dyan Wahyuning Tyas

NIM : I72215028

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia Studi Kasus: Kontibusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 10 Juli 2019

Yang menyatakan


Dyan Wahyuning Tyas

NIM. I72215028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dyan Wahyuning Tyas

NIM : I72215028

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul : **“Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia Studi Kasus: Kontibusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015”** , saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, Juli 2019

Pembimbing



M. Fathoni Hakim M.Si

PENGESAHAN

Skripsi oleh Dyan Wahyuning Tyas dengan judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia Studi Kasus: Kontribusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 31 Juli 2019.

TIM PENGUJI

Penguji I



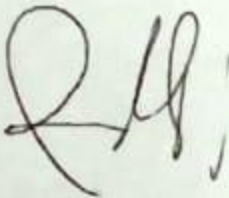
M.Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Penguji II



Zaky Ismail, M.Si
NIP. 19821302011011007

Penguji III



Ridha Amaliyah, S.IP, MBA
NUP.201409001

Penguji IV



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP. 199003252018012001

Surabaya, 31 Juli 2019

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dyan Wahyuning Tyas
NIM : I72215028
Fakultas/Jurusan : FISIP/Hubungan Internasional
E-mail address : dyanwahyuning@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMERANGI

PERDAGANGAN MANUSIA STUDI KASUS : KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PEMACAHAN KASUS BENJINA PADA TAHUN 2015

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2019

Penulis
METERAI
TEMPEL
6000
(Dyan Wahyuning Tyas)

Dyan Wahyuning Tyas, 2019, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia Studi Kasus: Kontribusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015*, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Fishery products are the largest commodity in the world and market demand is increasing every year. But this is inversely proportional to the availability of fish in the sea which is increasingly decreasing every day. With the increasing market needs, the fisheries companies compete tightly to meet market needs even though it is means with illegal way. Using fishing equipment that is not environmentally friendly, fishing more than the quota limit, and employing the crew for 18-20 hours and not being paid are some of the efforts undertaken by fishing companies. In this case, PT.Pusaka Benjina Resources, who allegedly carried out human trafficking and slavery in their business. Using the Theory of Policy Making by William D. Coplin, in this case it was found that the policy adopted by the Indonesian government in resolving the Benjina Case as an effort to combat trafficking in persons, namely; (1) Revoke and freeze fishing permits, the fisheries business permits, and the fishing boat permits, (2) Conduct a moratorium on fishing vessels sailing in Indonesia, (3) Destruction of illegal fishing vessels, (4) Helping repatriation of victims.

Produk perikanan merupakan komoditas paling besar di dunia dan permintaan pasar meningkat setiap tahunnya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan ikan di laut yang semakin hari semakin menurun. Dengan kebutuhan pasar yang terus meningkat, perusahaan perikanan bersaing ketat demi memenuhi kebutuhan pasar bahkan dengan cara illegal sekalipun. Menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, menangkap ikan diluar batas kuota, hingga memperkerjakan awak kapal selama 18-20 jam dan tidak digaji adalah beberapa upaya yang dilakukan perusahaan perikanan. Dalam penelitian ini adalah PT.Pusaka Benjina Resources, yang diduga melakukan perdagangan manusia dan perbudakan dalam usahanya. Menggunakan Teori Pengambilan Kebijakan oleh William D. Coplin, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam penyelesaian Kasus Benjina sebagai upaya memerangi perdagangan manusia, yakni; (1) Mencabut dan membekukan surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), (2) Melakukan moratorium kapal lasang yang berlayar di Indonesia, (3) Penghancuran kapal-kapal penangkapan ikan illegal, (4) Membantu pemulangan korban.

BAB III : METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Sumber Data Penelitian.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Analisa Data.....	47
E. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
F. Subjek Penelitian.....	48
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	50
A. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Kasus Benjina.....	51
B. Dinamika dan Tantangan.....	63
C. Perdagangan Manusia dalam Sektor Perikanan.....	67
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Indonesia dalam Pemecahan Kasus Benjina.....	72
BAB V : PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Pedoman Wawancara	
Biodata Penulis	

Daftar Grafik

Grafik 1.1 : kapal asing yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2014.....58

Di zaman modern ini, perbudakan setidaknya ditutupi dalam dua bentuk yang berbeda, yang pertama dalam bentuk kontrak kerja, yang kedua adalah pelacuran. Praktik-praktik ini kemudian diubah bentuk menjadi penindasan dan perbudakan halus dengan cara yang berbeda⁵. Sebagian besar peneliti fokus dalam penyelidikan perbudakan modern dalam bentuk perdagangan seks dan eksploitasi anak juga wanita dan anak sebagai korban dari perdagangan seks dan industri seks. Penekan yang tidak proposional pada eksploitasi seksual ini telah menghasilkan penggabungan istilah perdagangan manusia dengan industri seks dan prostitusi. Sehingga memisahkan masalah perdagangan

⁵ Zezen Mutaqin: Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai Fishing Industry. *Journal of East Asia and International Law*. May 2018. ResearchGate diakses dari: ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5895-0813> pada 27 Februari 2019.

⁶United Nations, Sixty-seventh General Assembly Third Committee Meeting, “Heinous, Fast-Growing Crimes of Human, Drug Trafficking Will Continue to Ravage World’s Economics without Coordinated Global Action, Third Committee Told”, press release, 11 Oktober 2012

⁸*United Nations Convention against Transnational Organized Crime* diadopsi berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/55/25 tanggal 15 November 2000, berlaku mengikat sejak 29 September 2003

g sama, untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau *To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menekan Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Organized Crime), yang menjadikan Indonesia terikat secara hukum internasional tersebut, sehingga Indonesia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Selain itu di Indonesia sendiri telah ada Undang-Undang perdagangan manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindakan Pidana Perdagangan Orang atau yang

g sama, untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau *To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menekan Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Organized Crime), yang menjadikan Indonesia terikat secara hukum internasional tersebut, sehingga Indonesia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Selain itu di Indonesia sendiri telah ada Undang-Undang perdagangan manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindakan Pidana Perdagangan Orang atau yang

g sama, untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau *To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menekan Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Organized Crime), yang menjadikan Indonesia terikat secara hukum internasional tersebut, sehingga Indonesia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Selain itu di Indonesia sendiri telah ada Undang-Undang perdagangan manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindakan Pidana Perdagangan Orang atau yang

Benjina adalah salah satu pulau yang terdapat di Indonesia, pulau terpencil yang berada di kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, ini menjadi salah satu kawasan industri perikanan laut dunia yang ada di Indonesia. PT. Pusaka Benjina Resources adalah perusahaan perikanan asal Thailand yang berafiliasi dengan perusahaan Indonesia. Hasil yang diperoleh PT. Pusaka Benjina Resources kemudian dikirim ke Thailand sebelum akhirnya di ekspor ke berbagai Negara melalui perdagangan internasional. Thailand adalah pengeksport produk makanan laut terbesar ketiga di dunia, dengan nilai ekspor lebih dari USD 7 miliar pada tahun 2011, Thailand mengeksport sebagian besar ke Amerika Serikat (sekitar USD 1,6 miliar nilai ekspor pada 2013) dan pasar Eropa (Euro 835,5 juta)¹¹. Mereka mengeksport ikan-ikan tersebut pada supermarket-supermarket besar seperti Kronger, Albertsons and Safeway, retailer terbesar Amerika, Wal-mart, dan distributor terbesar makanan Amerika yaitu Sysco. Ini berarti bahwa, apabila anda

¹¹ EFJ, The Continued Plight of Trafficked Migrants, *supra* note 14. See also FAO, The State of Fisheries and Aquaculture re 71 (2012); AP, *supra* note 11, hal. 16.

Dalam menjalankan usahanya, PT. Pusaka Benjina Resources tentu memerlukan sumber daya manusia sebagai pekerja yang bertugas menangkap ikan. Kebanyakan dari pekerja adalah warga Negara Myanmar, kemudian Kamboja, Laos¹³. Namun nelayan yang bekerja tidak diperlakukan sebagaimana layaknya pekerja pada umumnya, mereka cenderung diperbudak oleh kapten yang bertugas di kapal tersebut. Dalam laporan yang berjudul “Was Your Seafood Caught By Slaves?” pada 25 Maret 2015¹⁴, Associated Press mengatakan bahwa kapten-kapten kapal memaksa nelayan untuk bekerja selama 20-22 jam per hari setiap giliran, memaksa mereka untuk minum air kotor, tanpa ada libur. Mereka digaji sangat kecil atau bahkan tidak digaji sama sekali untuk pekerjaan menarik jala. Dalam laporan tersebut memaparkan bahwa para nelayan seringkali ditendang, dicambuk dengan ekor ikan pari, dan dipukul apabila mereka mengeluh atau mencoba istirahat. Sehingga banyak diantara mereka yang cacat atau bahkan mati di kapal. Korban yang kebanyakan dari bagian Rakhine (Rohingya), Myanmar, melarikan diri dari tempat penganiayaan mereka namun kemudian tertangkap oleh penyelundup yang kemudian di jual ke kapal penangkap ikan untuk dijadikan budak.

¹⁴AP Investigation: Slaves May Have Caught The Fish You Bought <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> diakses pada 27 Februari 2019

terpencil dan sulit dijangkau untuk menyulitkan pengawasan. Prapra-
ntan anggota perlemen Thailand mengaku pada jurnalis AP (Assos-
h menyuap para pejabat Indonesia sehingga mereka di ijinan pergi k-
⁵, dan mengeluh bahwa tindakan pemerintah Indonesia ya-
gu bisnis mereka. Pekerja asing illegal tersebut diberikan dokumen p-
iland tidak dapat memperkerjakan awak yang tidak berdokumen.
ng diperbudak di kapal tersebut, Maung Soe, mengatakan bahwa dia
ut palsu milik warga Negara Thailand, yang kemudian diterima di
n perjalanan informal¹⁶.

pal-kapal pada perusahaan ini juga sering menggunakan pelabuhan
gunakan pelabuhan resmi yang disediakan pemerintah. Ketua T
ti Illegal Fishing, Achmad Santosa menyebutkan pelanggaran
PT. Pusaka Benjina Resources adalah adanya temuan Unit Pengel-

terpencil dan sulit dijangkau untuk menyulitkan pengawasan. Prapraja, mantan anggota perlemen Thailand mengaku pada jurnalis AP (Assosiated Press) bahwa ia menyuap para pejabat Indonesia sehingga mereka di ijinan pergi ke perairan Indonesia⁵, dan mengeluh bahwa tindakan pemerintah Indonesia yang menghambat bisnis mereka. Pekerja asing illegal tersebut diberikan dokumen palsu oleh Thailand tidak dapat memperkerjakan awak yang tidak berdokumen. Prapraja yang diperbudak di kapal tersebut, Maung Soe, mengatakan bahwa dia menggunakan dokumen palsu milik warga Negara Thailand, yang kemudian diterima di Indonesia dalam perjalanan informal¹⁶.

Kapal-kapal pada perusahaan ini juga sering menggunakan pelabuhan ilegal dan tidak menggunakan pelabuhan resmi yang disediakan pemerintah. Ketua Tim Pengawasan Illegal Fishing, Achmad Santosa menyebutkan pelanggaran ini dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources adalah adanya temuan Unit Pengelompokan Kapal Ikan yang tidak memiliki dokumen yang sah.

terpencil dan sulit dijangkau untuk menyulitkan pengawasan. Prapraja, mantan anggota perlemen Thailand mengaku pada jurnalis AP (Assosiated Press) bahwa ia menyuap para pejabat Indonesia sehingga mereka di ijinan pergi ke perairan Indonesia⁵, dan mengeluh bahwa tindakan pemerintah Indonesia yang menghambat bisnis mereka. Pekerja asing illegal tersebut diberikan dokumen palsu oleh Thailand tidak dapat memperkerjakan awak yang tidak berdokumen. Prapraja yang diperbudak di kapal tersebut, Maung Soe, mengatakan bahwa dia menggunakan dokumen palsu milik warga Negara Thailand, yang kemudian diterima di Indonesia dalam perjalanan informal¹⁶.

Kapal-kapal pada perusahaan ini juga sering menggunakan pelabuhan ilegal dan tidak menggunakan pelabuhan resmi yang disediakan pemerintah. Ketua Tim Pengawasan Illegal Fishing, Achmad Santosa menyebutkan pelanggaran ini dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources adalah adanya temuan Unit Pengelompokan Kapal Ikan yang tidak memiliki dokumen yang sah.

terpencil dan sulit dijangkau untuk menyulitkan pengawasan. Prapraja, mantan anggota perlemen Thailand mengaku pada jurnalis AP (Assosiated Press) bahwa ia menyuap para pejabat Indonesia sehingga mereka di ijinan pergi ke perairan Indonesia⁵, dan mengeluh bahwa tindakan pemerintah Indonesia yang menghambat bisnis mereka. Pekerja asing illegal tersebut diberikan dokumen palsu oleh Thailand tidak dapat memperkerjakan awak yang tidak berdokumen. Prapraja yang diperbudak di kapal tersebut, Maung Soe, mengatakan bahwa dia menggunakan dokumen palsu milik warga Negara Thailand, yang kemudian diterima di Indonesia dalam perjalanan informal¹⁶.

Kapal-kapal pada perusahaan ini juga sering menggunakan pelabuhan ilegal dan tidak menggunakan pelabuhan resmi yang disediakan pemerintah. Ketua Tim Pengawasan Illegal Fishing, Achmad Santosa menyebutkan pelanggaran ini dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources adalah adanya temuan Unit Pengawasan

terpencil dan sulit dijangkau untuk menyulitkan pengawasan. Prapraja, mantan anggota perlemen Thailand mengaku pada jurnalis AP (Assosiated Press) bahwa ia menyuap para pejabat Indonesia sehingga mereka di ijinkan pergi ke perairan Indonesia⁵, dan mengeluh bahwa tindakan pemerintah Indonesia yang menghambat bisnis mereka. Pekerja asing illegal tersebut diberikan dokumen palsu oleh Thailand tidak dapat memperkerjakan awak yang tidak berdokumen. Prapraja yang diperbudak di kapal tersebut, Maung Soe, mengatakan bahwa dia menggunakan dokumen palsu milik warga Negara Thailand, yang kemudian diterima di Indonesia dalam perjalanan informal¹⁶.

Kapal-kapal pada perusahaan ini juga sering menggunakan pelabuhan ilegal. Prapraja menggunakan pelabuhan resmi yang disediakan pemerintah. Ketua Tim Pengawasan Anti Illegal Fishing, Achmad Santosa menyebutkan pelanggaran yang dilakukan PT. Pusaka Benjina Resources adalah adanya temuan Unit Pengelompokan Kapal yang tidak memiliki dokumen yang sah.

Kasus ini menjadi ramai dibicarakan di seluruh dunia, dan akibatnya banyak Negara menentang pemerintah Thailand atas tindakan keji yang dilakukan warganya. Termasuk pula Amerika, yang seperti penjelasan sebelumnya adalah salah satu negara yang banyak mengimpor ikan dari Thailand, pada tahun 2014 mereka menempatkan Thailand dalam daftar hitam karna minimnya standard dan gagalnya pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia, namun tidak ada sanksi tambahan¹⁸. Kecaman juga datang dari supermarket dan perusahaan-perusahaan memasok ikan dari Thailand, mereka mengaku tidak mengetahui proses dibalik impor ikan yang mereka lakukan dengan Thailand. Lebih khusus, dalam daftar pantau departemen luar negeri AS melaporkan bahwa mereka menurunkan Thailand ke tingkat 3 (Tier 3) yang sebelumnya tingkat 2 (tier 2) selama empat tahun berturut-turut (2010-2013)¹⁹, yang berarti bahwa Thailand memiliki masalah serius dalam perdagangan manusia. Thailand tidak

¹⁹ Zezen Mutaqin: Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai Fishing Industry. *Journal of East Asia and International Law*. May 2018. ResearchGate hal.91 diakses dari: ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5895-0813> pada 27 Februari 2019.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa PT. Pusaka Benjina Resources berada di wilayah Indonesia dalam operasinya, namun perusahaan tersebut adalah milik Thailand yang berafiliasi di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa perbudakan sangat marak terjadi khususnya di Negara berkembang, seperti masalah perekonomian dan juga marak terjadinya korupsi di Negara tersebut. Zhang dan Pineda mengatakan bahwa korupsi adalah satu-satunya faktor penyebab yang konsisten untuk terjadinya perdagangan manusia²⁰, mereka menggunakan uji korelasi statistik antara perdagangan manusia dan faktor-faktor lain seperti kemiskinan pendidikan dan korupsi. Menggunakan laporan TIP sebagai variable perdagangan manusia dan indeks persepsi korupsi (CPI) dari Transparency International untuk mengukur korupsi. Mereka juga mengkorelasi antara perdagangan manusia dan tingkat kemiskinan, hasilnya 'kemiskinan' tidak konsisten dengan perdagangan manusia. sehingga satu-satunya variabel konsisten yang berkorelasi dengan perdagangan manusia adalah korupsi²¹. Semakin banyak korupsi terjadi di suatu negara semakin tinggi tingkat perdagangan manusianya. Korupsi juga marak terjadi di Thailand, ini bukan masalah yang unik dan hampir terjadi di seluruh wilayah di muka bumi. namun menurut Transparency International indeks persepsi korupsi (IPK) Thailand turun menjadi 36²², yang artinya semakin banyak korupsi terjadi di Thailand. Apabila

²² K. Bales, *Understanding Global Slavery: A Reader* 15-6 (2005); dalam K. Richards, *The Trafficking of*

Dalam kasus ini tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi jelas terjadi, sebagai upaya untuk memudahkan transaksi atau aktivitas lain yang diperlukan dalam mentransfer pekerja dari luar hingga akhirnya mereka diperbudak di kapal-kapal besar milik PT. Pusaka Benjina Resources, keterlibatan angkatan laut Thailand, polisi, dan petugas imigrasi Thailand dalam penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan demi kepentingan diri mereka sendiri. Laporan TIP tahun 2014 menyatakan bahwa pejabat sipil dan militer Thailand mendapat keuntungan dari penyelundupan para pencari suaka Rohingya dari Burma dan Bangladesh dan juga mereka terlibat dalam penjualan pekerja paksa di kapal penangkap ikan²³. Pejabat angkatan laut dan anggota angkatan laut Thailand juga diduga ditarik kapal-kapal yang memuat para migran dari Myanmar ke wilayah pantai Thailand dan menjualnya kepada para pialang, yang kemudian menjual kembali para korban ke kapal-kapal penangkap ikan. Polisi Thailand secara sistematis memindahkan migran Rohingya dari fasilitas penahanan dan mengangkut mereka ke Thailand Selatan. Para tengkulak memperantarai penjualan para korban kepada para pedagang manusia sebagai tenaga kerja, baik di kamp-kamp hutan sebagai koki dan penjaga, atau di atas kapal penangkap ikan.

²³ AP Investigation: Slaves May Caught The Fish You Bought <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> diakses pada 27 Februari 2019

Kemudian yang berkenaan dengan hak-hak buruh, Thailand telah memberlakukan beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Perburuhan tahun 1998 dan amandemennya pada tahun 2008 dan 2010, Undang-Undang Hubungan Perburuhan tahun 1975, Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Perburuhan dan Prosedur

²⁵Thai Anti-Human Trafficking Action, The New Fisheries Act, Jan. 15, 2015, diakses pada 30 Maret <http://www.thaiantihumantraffickingaction.org/Home/?p=457>

Lalu setelah ratifikasi protokol Palermo pada tahun 2001, Thailand memberlakukan Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang (“ATIP”) pada tahun 2008 (B.E 2251). ATIP mencerminkan protokol Palermo. Ini berisi 6 bab yang mencakup²⁷: (Bab 1) ketentuan umum, (Bab 2) pembentukan Komite Anti-Trafficking, (Bab 3) mengumumkan kekuasaan dan tugas pejabat, (Bab 4) perlindungan dan bantuan para korban perdagangan, (Bab 5) membangun dana untuk memberantas perdagangan orang, (Bab 6) dan sanksi dan hukuman. Sebagai anggota dari ASEAN dan PBB, Thailand juga telah meratifikasi instrumen hukum tentang hak asasi manusia yang kemudian berhubungan dengan undang-undang mengenai pekerja migran dan perdagangan manusia. Namun apakah Thailand telah benar-benar melakukan apa yang telah tertuang dalam undang-undang domestik dan internasional. Dalam menanggapi masalah

²⁷ Thailand Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008) [Thailand], 30 January 2008, *diakses melalui* <http://www.refworld.org/docid/4a546ab42.html>

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang bisa diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kontribusi yang diberikan pemerintah Indonesia dalam pemecahan kasus perbudakan di Benjina.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap besar dapat memberikan kontribusi baik dalam bidang akademis maupun praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pengetahuan ilmu hubungan internasional dan mampu menambah kajian maupun fakta yang terjadi dibalik fenomena yang terjadi. Sehingga dapat menambah pengetahuan sekaligus memberikan pengetahuan bagi para akademisi.

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan masalah perdagangan manusia. Memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia maupun pemerintah

E. Kerangka Konseptual

1. Perbudakan adalah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, dalam praktiknya perbudakan tidak lepas dari eksploitasi yang berlebihan terhadap korban yang dapat diartikan pula dengan perdagangan manusia.
2. Pedagangan manusia menurut Protokol Palermo didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penerimaan orang, melalui ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup sekurang-kurangnya, eksploitasi pelacuran orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau yang mirip dengan perbudakan, atau pengambilan organ tubuh.
3. Penyelundupan adalah pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, manfaat-manfaat material maupun manfaat finansial, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu negara pihak dimana orang tersebut bukan penduduk atau warga tetap negara tersebut. Pelanggaran

- [illegible]

- ## F. Tinjauan Pustaka

1. *The Slave Trade and The Right Visit Under The Law and The Sea Convention: Eksploitation in the Fishing Industry in New Zealand and Thailand*²⁹ oleh Douglas Macfarlane, University of Sidney Australia, yang membahas mengenai eksploitasi parah terhadap orang-orang rentan terjadi di industri perikanan secara global. Tinjauan tentang eksploitasi di Selandia Baru dan Thailand menyoroti insentif bagi negara-negara untuk meremehkan eksploitasi dan menopang daya tarik hak kunjungan, yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut terkait dengan perdagangan budak. Meskipun dilaporkan sebagai kerja paksa, jeratan hutang, atau perdagangan manusia, sebuah pemeriksaan yurisprudensi internasional mengungkapkan bahwa praktik-praktik saat ini kemungkinan besar

[illegible]

2. *A Future Trajectory of Human Trafficking and Slavery on Fishing Vessels from International Law Perspective: A Case Study of Fishing Scandal in Benjina, Indonesia*³⁰ oleh Muhammad Shobaruddin, Thammasat University, yang membahas mengenai bagaimana instrumen hukum internasional mendefinisikan dan mengatur perdagangan orang dan perbudakan, kemudian diskusi untuk lintasan perdagangan manusia dan perbudakan di masa depan yang diuraikan secara rinci. Ada banyak kendala dalam mengungkap perdagangan orang dan perbudakan di kapal penangkap ikan. Kendala-kendala tersebut termasuk rekrutmen nelayan migran, penyupaan kepada otoritas hukum serta penyebaran pasar ikan. Oleh karena itu, dikemukakan bahwa kasus-kasus lain juga mungkin terjadi di belahan dunia lain. Perdagangan orang dan perbudakan di

[illegible]

Distingsinya pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai peran pemerintah suatu negara yang telah menandatangani konvensi atau perjanjian internasional terkait kejahatan yang terjadi di laut. Kemudian menganalisa apakah tindakan negara tersebut telah sesuai dengan konvensi atau instrument hukum internasional.

oleh Benni Yusriza, Lund University yang membahas tentang konsep kerangka kerja Jaringan Produksi Global (GPN) dan tenaga kerja tidak bebas untuk menempatkan dinamika tenaga kerja budak dalam struktur industri perikanan Indonesia. Argumen utamanya adalah bahwa dinamika jaringan produksi industri perikanan Indonesia sangat mendasar dalam mereproduksi kondisi rentan para korban. Pertama, penaklukan para korban hadir dalam dinamika penciptaan nilai GPN dan penangkapan nilai. Kedua, kekuatan yang dilakukan oleh aktor-aktor lain untuk menangkap nilai lebih juga telah memainkan peran penting dalam memperluas kondisi rentan para korban. Di sini, solusi apa pun yang diambil untuk menyelesaikan masalah oleh aktor-aktor lain yang terlibat gagal menegakkan dan memberdayakan kemampuan korban untuk

[illegible]

³³ Seftiani, Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer, (Jakarta: PT.RajaGraffindo Persada, 2016).

Untuk memberikan gambaran penulisan penelitian ini, maka mahasiswa memberikan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Pada bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, tempat dan waktu pelaksanaan, metode pengumpulan data penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian, memberikan gambaran tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian secara keseluruhan sehingga pembaca dapat memperoleh informasi singkat dan tertarik untuk membaca lebih lanjut karena telah memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut secara teoritis.

Pada bagian ini mendeskripsikan mengenai ragam hukum yang mengatur tentang perdagangan manusia baik itu hukum nasional Indonesia, maupun hukum internasional ataupun hukum yang diatur dalam ASEAN sebagaimana Indonesia adalah anggota dari komunitas tersebut. Juga termasuk didalamnya adalah hukum yang mengatur tentang perikanan, hukum laut atau perjanjian kerja laut, dan hukum mengenai tenaga kerja atau tenaga kerja asing.

Pada bab ini menguraikan secara menyeluruh mengenai bentuk-bentuk kontribusi yang dilakukan Indonesia terhadap pemecahan kasus Benjina, mulai dari pelaku hingga korban. Juga dampak kasus tersebut dalam industri perikanan Indonesia.

Pada bagian akhir dari laporan penulisan penelitian ini memaparkan kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh yang dirangkum dan dikemas dalam penelitian sederhana. Selain itu, dicantumkan pula hambatan serta saran juga rekomendasi sebagai ungkapan atau pesan terakhir yang diharapkan menambah kajian pengetahuan pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORITIK

Pada bab ini peneliti akan menggunakan Teori Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri dengan pendekatan realitas milik William D. Coplin. Konsep ini dipandang tepat oleh peneliti karna konsep ini menerangkan bahwa Negara adalah aktor untuk mencapai suatu tujuan nasional, dan politik luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara adalah suatu bentuk respon dari apa yang dilakukan negara lain. Dengan pendekatan realitas ini kemudian dapat menganalisis respon apa saja yang akan dilakukan suatu negara sebagai bentuk perhitungan yang rasional. Dengan perhitungan rasionalnya, suatu negara kemudian akan dapat mendapatkan beberapa alternatif-alternatif yang ada sehingga dapat diputuskan mana pilihan yang baik sebagai respon dalam politik luar negerinya.

Menurut Coplin dalam pengambilan keputusan suatu negara agar dapat sesuai dengan kepentingan nasional, pemimpin negara atau pembuat kebijakan memiliki faktor tertentu sehingga dapat memustukan kebijakan yang sesuai. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara, yaitu politik dalam negeri suatu negara, kemampuan ekonomi dan militer suatu negara, dan konteks internasional lain seperti letak geografis, dimana negara tersebut mendapatkan jatidirinya, terutama terkait hubungannya dengan negara lain dalam system tertentu. Terdapat pula beberapa variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri seperti salah satunya yaitu Variable Idiosyncratic atau variabel individu, yang mana variabel ini

Dalam bab ini penulis juga menggunakan peraturan dan instrumen hukum lainnya yang dirasa dapat membantu penelitian. Beberapa peraturan dan instrumen hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis seperti, instrument hukum HAM yang di tetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, larangan perbudakan dan perlindungan buruh migran, dan perizinan usaha perusahaan pelayaran.

Teori pengambilan keputusan bertujuan sebagai suatu analisa yang menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara sebagai wujud aksi negara dalam politik internasional. Pendekatan ini kemudian akan melihat adanya hubungan antara lingkungan yang berkesinambungan dengan pembuatan atau pengambilan keputusan. Intinya adalah bagaimana hubungan antara pembuat kebijakan dan proses kebijakan tersebut diambil. Konsep pembuatan keputusan sudah lama digunakan dalam sejarah diplomasi maupun dalam aktivitas lembaga pemerintahan.

³⁴ Rikan Krisna, William D. Coplin Introduction to International Politic : *Model of Decision Making Proses*, (Yogyakarta : Hubungan Internasional, FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013)

Pendekatan ini disebut rasional karena negara akan menimbang atau menganalisis alternative yang ada sehingga dapat diputuskan mana yang baik dan tidak cocok untuk dijadikan respon dalam politik luar negeri. Untuk dapat memahami bagaimana suatu negara mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan nasional mereka, Coplin mengatakan bahwa apa yang melatar belakangi pemimpin negara membuat keputusan juga sesuatu yang perlu dipahami. Adalah suatu kesalahan apabila kita menganggap bahwa pemimpin atau para pembuat kebijakan luar negeri memutuskan dalam suatu keadaan yang vacuum. Coplin mengatakan bahwa, setiap kebijakan luar negeri yang dihasilkan adalah pertimbangan dari tiga kategori yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara pembuat keputusan. Tiga kategori itu yaitu³⁵:

- ³⁵ Ibid.

- Variable Sosial, yang berkenaan dengan identifikasi efek struktur kelas yang ada, penyebaran, status, distribusi pendapatan, budaya, persamaan ras linguistik, dan anggapan terhadap politik luar negeri negara lain.
- Variabel Peranan, yang berkenaan dengan gambaran pekerjaan atau sebagai aturan-aturan yang diharapkan bagi seseorang yang berkompeten dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri.
- Variable sistemik atau *Systemic Influences*, yaitu variable yang berkenaan dengan struktur dan proses internasional.

a. Kebijakan luar negeri yang umum, yang terdiri dari serangkaian keputusan yang dinyatakan dengan kebijakan dan tindakan tidak langsung.

[illegible]

Dapat dikatakan bahwa hukum internasional hanya fokus pada hubungan antar Negara saja, namun sebenarnya beberapa cabang yang ada dalam hukum internasional mengandung peraturan perlindungan untuk individu. Beberapa hukum internasional yang terkait dalam judul penelitian ini adalah:

Sejak awal abad ke-19 telah muncul hukum tentang larangan perbudakan, munculnya hukum tersebut melalui pengkodifikasian hukum kebiasaan internasional ke dalam The Slavery Convention tahun 1926, kemudian disempurnakan ke dalam Convention on The Abolition of Slavery and The Slave Trade tahun 1956³⁹, kemudian juga tentang konvensi Larangan Perdagangan Manusia Khususnya Wanita dan Anak-anak (Prohibition

[illegible]

1.1 Konvensi tentang Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dalam pasal 6 secara eksplisit menyatakan bahwa melarang perdagangan manusia dan eksploitasi prostitusi wanita.

trument hukum HAM lainnya:

a. Slavery Convention

c. Supplementary Convention on The Abolition of Slavery, The Slave Trade, and Institutions and Practice similar to Slavery

e. Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (no.105)

⁴¹ United Nations Treaty Collection, Slavery, Slavery-Like Practice and Forced Labour <https://treaties.un.org> diakses pada 28 februari 2019

- ## 2.2 Rights of Migrant

- ## 2.3 Perlindungan Terhadap Buruh Migran

- a. Konvensi ILO Nomor 95 Tahun 1949 tentang Perlindungan Upah⁴²
- b. Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949 tentang Migrasi untuk Bekerja⁴³, yang antara lain mengatur tentang Standar Rekrutmen dan Kondisi Kerja Buruh Migran
- c. Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975 tentang Buruh Migran⁴⁴, yang antara lain mengatur persoalan-persoalan buruh migran tidak berdokumen, sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia.

⁴⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, K 143 Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan) Tahun 1975 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_145819.pdf diakses pada 26 Februari 2019

D. PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN PELAYARAN

⁴⁷Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri Kebijakan deregulasi bidang perdagangan, industri, pertanian, dan perhubungan laut pada November 1988 www.bappenas.go.id/index.php diakses pada 26 Februari 2019

pejabat yang ditunjuk, dan ini sesuai dengan pasal 10 tentang kewajiban pelayaran rakyat untuk mem-
yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk mendapatkan izin usaha ini sama dengan memperoleh izin operasi kapal. Untuk mengajukan izin operasi karna telah melekat dengan izin usaha. Dalam persyaratan usaha disebutkan bahwa bagi perusahaan pelayaran nasional dan perusahaan asing yang memiliki setidaknya sebuah kapal yang layak laut berbe-
kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan angkutan laut. Hal ini terdapat dalam buku "Peraturan Angkutan Laut dalam Daerah Pelayaran". Kewajiban dan tanggung jawab perusahaan pelayaran adalah sebagai berikut:
Mengoperasikan kapal layak jalan

pejabat yang ditunjuk, dan ini sesuai dengan pasal 10 tentang kewajiban pelayaran rakyat untuk mem-
yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk mendapatkan izin usaha ini sama dengan memperoleh izin operasi kapal. Untuk mengajukan izin operasi karna telah melekat dengan izin usaha. Dalam persyaratan usaha disebutkan bahwa bagi perusahaan pelayaran nasional dan perusahaan pelayaran asing yang memiliki setidaknya sebuah kapal yang layak laut berbe-
kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan angkutan laut. Hal ini terdapat dalam buku "Peraturan Angkutan Laut dalam Daerah Pelayaran". Kewajiban dan tanggung jawab perusahaan pelayaran adalah sebagai berikut:
Mengoperasikan kapal layak jalan

- pejabat yang ditunjuk, dan ini sesuai dengan pasal 10 tentang kewajiban pelayaran rakyat untuk mem-
yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditun-
nya izin usaha ini sama dengan memperoleh izin op-
untuk mengajukan izin operasi karna telah melekat de-
am persyaratan usaha disebutkan bahwa bagi p-
antara perusahaan pelayaran nasional dan perusahaan
iliki setidaknya sebuah kapal yang layak laut berbe-
kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan ang-
at dalam buku “Peraturan Angkutan Laut dalam De-
mar, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan pelay-
Mengoperasikan kapal layak jalan

pejabat yang ditunjuk, dan ini sesuai dengan pasal 10 tentang kewajiban pelayaran rakyat untuk mem-
yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk mendapatkan izin usaha ini sama dengan memperoleh izin operasi kapal. Untuk mengajukan izin operasi karna telah melekat dengan izin usaha. Dalam persyaratan usaha disebutkan bahwa bagi perusahaan pelayaran nasional dan perusahaan pelayaran asing yang memiliki setidaknya sebuah kapal yang layak laut berbe-
kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan angkutan laut. Hal ini terdapat dalam buku "Peraturan Angkutan Laut dalam Daerah Pelayaran". Kewajiban dan tanggung jawab perusahaan pelayaran adalah sebagai berikut:
Mengoperasikan kapal layak jalan

- **Bab II pasal 3** mengatakan bahwa⁵¹: “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- **Pasal 7 ayat 1 dan 2** mengatakan bahwa⁵²: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan hidupnya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda

⁵¹ Ibid, 5.

⁵² Ibid, 6.

- Indonesia memiliki peraturan tentang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing termasuk didalamnya syarat perekrutan dan perlindungan terhadap tenaga kerja yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing⁵⁷. Keseluruhan isinya dapat menjadi acuan dalam menangani kasus perbudakan yang terjadi di Benjina pada tahun 2015. Termasuk pula didalamnya undang-undang yang mengatur tentang dana yang harus dibayarkan oleh penyelenggara atau pihak pemberi kerja sebagai PNBP atau Penerimaan Daerah sebesar US\$100 per jabatan per orang. Indonesia juga memiliki ketentuan mengenai penempatan tenaga

⁵⁷Undang-Undang nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing <https://tka-online.kemnaker.go.id> diakses pada Februari 2019

a. Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ ILO*)

[illegible]

tidak mengikat, memberikan pedoman kebijakan atau tindakan nasional. Biasanya membahas tentang masalah-masalah yang dibahas di konvensi⁵⁸.

Pada akhir tahun 2009 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi, terdapat berbagai macam subjek didalamnya seperti: kebebasan berserikat, kesetaraan perlakuan, kesetaraan kesempatan, perundingan bersama, pelatihan kerja, promosi ketenagakerjaan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak dibawah umur, kondisi kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan administrasi, jaminan sosial, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan, perlindungan terhadap pekerja migran, perlindungan terhadap kategori pekerja lainnya seperti pelaut, pekerja perkebunan, dan perawat. Setiap anggota yang termasuk dalam ILO wajib mematuhi konvensi dan peraturan yang berlaku, hal tersebut bersifat mengikat pada anggota.

Dalam pasal 2 Konvensi ILO yang berkenaan dengan migrasi tenaga kerja edisi revisi tahun 1949, menyebutkan bahwa setiap anggota ILO yang terikat untuk mematuhi konvensi ini, wajib memastikan, atau mengusahakan pemberian pelayanan yang memadai, layak dan cuma-cuma, yang membantu tenaga kerja migran terkait pemberian informasi yang tepat dan benar kepada mereka⁵⁹.

Kemudian dalam pasal 6 Konvensi ILO yang berkenaan dengan migrasi tenaga kerja edisi revisi tahun 1949, menyebutkan bahwa negara anggota yang terikat untuk mematuhi konvensi ini, wajib untuk tidak membedakan ras,

⁵⁸ Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) Tahun 1949 diselenggarakan di Jenewa oleh Dewan Pembina Kantor Perburuhan Internasional. Tanggal mulai diberlakukannya 22 Januari 1952

⁵⁹ Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) Tahun 1949. Hal.7

b. Peraturan UNODC Tentang Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran

⁶⁰ Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) Tahun 1949. Hal.9

[illegible]

1. Mengkriminalkan perdagangan orang sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Protokol dan menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan sifat-sifat buruk pelanggaran tersebut.
2. Melindungi korban semaksimal mungkin sesuai hukum domestik, termasuk melindungi privasi dan identitas korban sebagai pertimbangan berbagai pelayanan sosial untuk pemulihan yang memungkinkan dari trauma yang telah diterima dari pengalaman mereka.
3. Memastikan bahwa sistem hukum berisi langkah-langkah yang memungkinkan korban mendapat kompensasi.
4. Memperkuat kontrol perbatasan yang kiranya diperlukan untuk mencegah perdagangan orang terjadi kembali tanpa mengurangi kewajiban internasional lainnya.
5. Memastikan segala kebutuhan mengenai verifikasi dokumen-dokumen dilakukan dengan segera, termasuk didalamnya identitas nasional, integritas perjalanan nasional.
6. Memperkuat dengan sebagaimana mestinya, menjalin kerjasama dengan negara-negara lain mengenai hal-hal yang terkait seperti pertukaran informasi mengenai identitas, penggunaan dokumen ilegal, dan cara yang digunakan oleh tersangka pelaku perdagangan manusia.
7. Mempertimbangkan pula agar korban bisa tetap tinggal di wilayah mereka baik secara permanen ataupun sementara dengan pertimbangan kemanusiaan dan kasih sayang.

- ## Konvensi Tenaga Kerja Maritim 2006

Konvensi Tenaga Kerja Maritim atau MLC (Maritime Convention)⁶³ adalah konvensi yang dibuat oleh Organisasi Buruh Internasional

Dalam kewajiban umum (*General Obligations*) pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap negara anggota yang meratifikasi konvensi

Tenaga Kerja Maritim (International Labour Organizations-Maritime Labour Con

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses yang mengeksplorasi suatu masalah. Cresswell menjelaskan lebih lanjut bahwa metode penelitian kualitatif menjadikan peneliti membangun gambaran secara menyeluruh, menganalisis kalimat, memberikan laporan secara rinci dari informan⁶⁴. Metode penyajian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu menganalisa atau menggambarkan suatu permasalahan dengan konsep tertentu yang relevan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretative dengan melibatkan banyak metode dalam memahami masalah penelitiannya. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang diamati dari suatu individu atau kelompok, baik kelompok masyarakat maupun organisasi tertentu.

⁶⁴ Prof. Dr. Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. (Jakarta: Raja Garfindo Perasada, 2016), 2.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber penelitian data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya⁶⁵. Kemudian data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk mencari fakta sebenarnya, data hasil observasi yang telah dilakukan maupun mengecek kembali data yang sebelumnya telah dipaparkan⁶⁶. Data tersebut bersumber dari dokumen-dokumen, buku, jurnal, artikel dari situs internet (penelusuran online) yang berhubungan dengan bentuk-bentuk kontribusi yang dilakukan oleh Indonesia dalam pemecahan kasus di Benjina, Maluku oleh PT. Pusaka Benjina Resources.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara dengan pihak terkait, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dilakukan. Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Metode dokumentasi akan membantu peneliti memperoleh

⁶⁶ Sugiyono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), 78

- Maulidiyah, Dosen Prodi Ilmu Kelautan- Pencemaran Laut
- Drs. Hasanuddin, M.M. , Kepala Bidang Setumad TNI
- Dody Yulianto, Kepala Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja, Pelindo
- Lia, pegawai bagian Penanganan Pelanggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik analisa data oleh Miles dan Huberman yaitu dengan melewati beberapa tahap analisis seperti: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan⁶⁷. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dalam menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena.

[illegible]

b) Penyajian Data

c) Kesimpulan

E. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

- Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Juni tahun 2019.

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini akan penulis paparkan beberapa data terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia serta kontribusinya dalam penyelesaian kasus benjina. Dalam penyajian data peneliti akan membagi menjadi empat aspek sebelum menuju pada analisis data. Aspek pertama membahas mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terhadap penyelesaian kasus Benjina, salah satunya yaitu kebijakan moratorium oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang di bantu oleh Polisi Republik Indonesia, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia, dan Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Dan kebijakan larangan pemindahkapalan yang terdapat dalam Keputusan Menteri dari Kelautan dan Perikanan No.57/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Aspek kedua membahas mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia selama penyelesaian kasus perbudakan di Benjina.

Aspek ketiga membahas sebab terjadinya perdagangan manusia dalam perikanan dan kejahatan laut secara general. Kemudian analisis kontribusi Indonesia dalam penyelesaian kasus Benjina.

dan dari Thailand mengaku tidak mengetahui
n yang di impornya. Namun ketika diberita
kan yang terjadi dibalik tangkapan ikan yang c
ian mengatakan bahwa mengutuk perbuatan p
penuntasannya.

dan dari Thailand mengaku tidak mengetahui
n yang di impornya. Namum ketika diberita
kan yang terjadi dibalik tangkapan ikan yang c
ian mengatakan bahwa mengutuk perbuatan p
penuntasannya.

dan dari Thailand mengaku tidak mengetahui
n yang di impornya. Namum ketika diberita
kan yang terjadi dibalik tangkapan ikan yang c
ian mengatakan bahwa mengutuk perbuatan p
penuntasannya.

⁶⁹ Zezen Mutaqin: Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai Fishing Industry. *Journal of East Asia and International Law*. May 2018. ResearchGate, 91.

Berawal dari isu boikot ini kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti mengungkapkan kejahatan perbudakan ini. Menteri Susi berkomitmen untuk menghapus segala tindakan perbudakan terkhusus pada wilayah kerjanya yaitu kelautan dan perikanan. Lebih lanjut ditemukan bahwa PT. Pusaka Benjina Resources memiliki awak kapal sebanyak 1.128 orang, diantaranya yaitu 746 warga asal Thailand, 316 warga asal Myanmar, 58 warga asal Kamboja, 8 orang warga asal Laos. Dari ribuan orang tersebut, 322 orang berhasil di amankan di Tual, Maluku. Beberapa diantaranya yaitu 256 warga asal Myanmar, 58 warga asal Kamboja, 8 warga asal Laos. Sedangkan 806 orang masih di Benjina, yaitu 746 warga asal Thailand dan 60 warga asal Myanmar⁷⁰.

data dan Fakta Pusaka Benjina Resources Versi Pemerintah diakses pada juni 2019
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150408165729-95-45142/data-dan-fakta-pusaka-benjina-resources-versi-pemerintah>

proses penyelamatan para korban perbudakan PT. Pusaka Benjina Resources dan usaha penangkapan pelaku perbudakan, pemerintah Indonesia terkhusus Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dan Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Selama tahun 2015 KKP dengan anggotanya berhasil menyelamatkan kurang lebih 1.342 orang ABK dari Benjina, sedangkan sebagian lainnya telah terlebih dahulu dipulangkan kembali ke Thailand dan Kamboja oleh PT.Benjina Pusaka Resources sebelum sempat di wawancarai oleh polisi⁷². Dalam Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan Di Indonesia yang penulis dapatkan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur pada proses pencarian data, kasus ini meluas menjadi tidak hanya perbudakan namun perdagangan manusia, dan penyelundupan imigran. Hukuman yang diberikan pada pelaku pun meluas tidak hanya karena kejahatan yang telah disebutkan sebelumnya, namun juga hukuman karena telah memalsukan dokumen ABK, melanggar perjanjian internasional, melanggar HAM dan lain-lain. Taktik PT. Pusaka Benjina Resources dalam menjalankan kegiatan ilegalnya adalah memindahkan ikan yang ditangkapnya secara ilegal menuju kapal lain yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang mana hal tersebut mencegah pihak berwenang di Indonesia menangkapnya. Akhirnya ikan hasil tangkapan

⁷² Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016)

Penangkapan ikan yang ilegal, penangkapan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur merupakan ancaman maritim yang sangat perlu diperhatikan, karna hal-hal diatas atas pintu masuk akan kejahatan-kejahatan lain yang dapat melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi transnasional. Sekertaris Jenderal PBB menyerukan pada semua negara anggotanya untuk memperluas pendekatan keamanan laut mereka, dan memusatkan pendekatan yang awalnya berpusat pada negara menjadi pada manusia⁷³. Adanya berbagai ancaman baru dalam keamanan laut, berkembang tidak lagi hanya perbatasan negara atau penggunaan kekuatan negara namun juga pada keselamatan manusia yang berada di darat seperti perdagangan manusia, penyelundupan, dan perbudakan yang terjadi dalam kasus Benjina. Dalam penyelesaian kasus Benjina ini, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan serta jajaran terkait yang telah disebutkan sebelumnya, menggunakan strategi keamanan laut yang didasarkan pada prioritas kepentingan, kekhususan regional, dan mempertimbangkan tingkat ancaman pada tiap ancaman dan risiko yang terdapat dalam kasus tersebut⁷⁴. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa IUU atau penangkapan ikan secara ilegal, penangkapan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dapat memberikan jalan bagi

⁷⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 32.

Kasus perbudakan yang terjadi di Benjina menyita perhatian dunia, betapa di era modern ini bukan hanya teknologi yang berkembang namun juga dalam sisi kejahatan. Perdagangan manusia, perbudakan dan penyelundupan migran tidak hanya dilakukan pada wanita dan anak-anak namun juga menyasar kaum laki-laki. Perdagangan manusia dengan tujuan yang lebih spesifik untuk dipekerjakan paksa di kapal-kapal penangkapan ikan di Benjina adalah salah satu kasus yang berhasil di pecahkan. Meski begitu masih banyak diluar sana perbudakan atau yang mirip dengan perbudakan terjadi begitu pula dengan kejahatan lain yang termasuk dalam lingkaran kejahatan transnasional. Beberapa kejahatan perikanan yaitu seperti ⁷⁶:

- Transaksi bahan bakar ilegal
- Menggunakan dua bendera identitas dan mendaftarkan kapal di dua negara
- Menggunakan surat ijin dan dokumen palsu
- Menggunakan alat tangkap ikan yang berbahaya atau ilegal digunakan
- Menggunakan tenaga kapten dan anak buah kapten asing

⁷⁶ Kementrian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 45.

- Kondisi taraf hidup yang di bawah standar dan tidak manusiawi
- Bekerja tanpa adanya keamanan sosial
- Menyakiti secara fisik dan mental
- Bekerja diluar batas ketentuan (18 hingga 20 jam per hari)
- Tidak adanya perlindungan kesehatan dan keamanan
- Pembunuhan dan pelecehan seksual
- Tidak adanya perjanjian kerja atau kontrak kerja
- Upah di bawah standar atau bahkan tidak digaji
- Menahan dokumen pribadi atau tanda pengenal korban
- Perekrutan dengan cara penipuan atau menjebak

⁷⁸ Ibid.

tahun 2000. Dalam protokol tersebut perdagangan manusia dapat dibedakan menjadi tiga aspek berbeda yaitu⁷⁹:

1. Aspek tindakan, yang berfokus pada perekrutan, penyembunyian, dan pemindahan korban
2. Sarana, yang membuat korban berada pada situasi yang eksploitatif
3. Tujuan dari eksploitasi

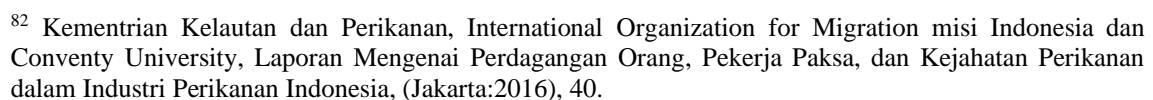
Menangani masalah penyelundupan imigran dan kerja paksa yang terjadi di Benjina, dalam UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah dicantumkan hukum-hukumnya seperti pada penjelasan Bab II. Namun dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Susi Pudjiastuti, pada Oktober 2014 memperkenalkan visi daripada kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia berfokus pada kelestarian, kedaulatan, dan kemakmuran. Kebijakan strategis yang termasuk dalam visi ini adalah penghentian sementara pada bekas kapal-kapal asing yang diberlakukan sejak Oktober 2014 hingga April 2015 yang kemudian diperpanjang hingga Oktober 2015⁸⁰. Moratorium penghentian sementara eks kapal asing ini merupakan penghentian sementara penerbitan dan perpanjangan izin usaha bagi penangkapan ikan⁸¹. Selain itu Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga membuat kebijakan

⁷⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia. (Jakarta:2016). 56.

⁸⁰ Selain kapal asing adalah kapal penangkap ikan yang dibuat di luar negeri menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2014.

⁸¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1)

Gambar 1.1 Rangkaian Kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.



Dan melakukan tindak kejahatan lain yang terkait perikanan seperti, korupsi, pencucian uang, penyelundupan narkoba, kejahatan pada imigrasi, penggantian bendera kapal, dan pelanggaran HAM. Pelanggaran tersebut kemudian berujung pada pengevakasian 700 awak kapal Myanmar dari Benjina pelabuhan Tual secara bertahap dari April hingga Mei 2015⁸⁵.

Mendengar laporan tersebut kemudian Presiden Joko Widodo mengambil langkah tindak lanjut dengan membentuk satuan kerja khusus yang bertugas untuk memberantas perdagangan manusia di Benjina. Setelah melakukan

⁸⁵ Ibid, 43-47.

investigasi oleh Satuan Tugas Khusus dibantu oleh Polri, kemudian dikonfirmasi bahwa terdapat 8 tersangka perdagangan manusia, 5 diantaranya adalah kapten-kapten warga asal Thailand, dan 3 pegawai perusahaan PT. Pusaka Benjina Resources⁸⁶. Masing-masing terdakwa bersalah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp.160.000.000; atau menjalani tambahan 6 bulan penjara, dan untuk kapten denda sebesar Rp. 773.000.000; untuk kompensasi terhadap para awak kapal yang menjadi korban.

Selain itu karena telah didapati bahwa mereka juga melakukan pelanggaran peraturan perikanan maka Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencabut dan membekukan surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), dan mengeluarkan surat-surat peringatan⁸⁷. Sebanyak 769 kapal melakukan pelanggaran berat dan sisanya melakukan pelanggaran biasa. Penegakan hukum ini tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Perikanan saja melainkan pula berdasarkan Undang-Undang lain seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, dan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Dalam melaksanakan eksekusi pengadilan terhadap kapal-kapal penangkapan ilegal jumlah total yang Presiden Joko Widodo hancurkan sebanyak 176 kapal penangkapan ikan.

⁸⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 130.

⁸⁷ Ibid, 37.

Dalam melakukan pemberantasan dan penyelamatan korban perdagangan manusia di Benjina, terdapat beberapa dinamika dan tantangan yang dialami oleh pemerintah Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu peraturan pemerintah Indonesia yang tumpang tindih sehingga menimbulkan kebingungan atas tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi tenaga kerja yang diterima, kebingungan atas pemantauan dan kondisi industri perikanan, kapal penangkapan ikan, dan agen pengawakan ikan. Hal ini didukung oleh Maulidiyah, seorang

dosen prodi Ilmu Kelautan bidang Pencemaran Laut⁸⁸, mengatakan bahwa tantangan yang kita bangsa Indonesia dapati adalah kurangnya sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang menunjang kita untuk mempercepat proses penyelamatan korban dan pemberantasan pelaku. Kurangnya alat yang digunakan, komunikasi yang hanya berada di kisaran petinggi pemerintahan juga menjadi faktor yang memperlambat kinerja kita. Otoritas pelabuhan juga kurang cepat dalam mencatat setiap pergerakan kapal terutama kapal asing. Kurangnya peran penyidik seperti angkatan laut, polisi air dan perikanan dalam melakukan pen penyelidikan terhadap kapal penangkap ikan dan membuktikan adanya pelanggaran seperti kerja paksa, perdagangan manusia di dalamnya. Tidak adanya pusat di pelabuhan untuk pelaporan atau pengaduan tindakan sewenang-sewenang yang diperuntukan bagi nelayan atau awak kapal⁸⁹.

Dinamika yang terjadi, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa apabila illegal fishing dilakukan secara massif, maka akan berdampak pada ekosistem laut lainnya. Seperti salah satu contohnya, kerusakan koral laut akibat berkurangnya ikan dilaut. Maka hal tersebut bisa berdampak pula untuk perekonomian, karena budi daya koral dan perawatannya menggunakan dana yang banyak dan memakan waktu yang lama.

Indonesia memiliki Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia yang membahas tentang bagaimana pihak-pihak yang berwenang dapat memberantas

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Maulidiyah, dosen Pencemaran Laut, Ilmu Kelautan Fakultas Sains dan Teknologi

⁸⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016),20.

ernasional tentang pelayaran dan penangkapan ikan atau tentang k
dagangan yang telah berlaku bertahun-tahun, padahal konvensi
enting untuk perlindungan nelayan dan anak buah kapal Indonesi
kerja asing. Beberapa konvensi yang belum ditandatangani oleh
adalah Konvensi Tenaga Kerja Maritim atau MLC (Maritim
Convention), dan konvensi yang dibuat oleh ILO yaitu Konvensi
Penangkapan Ikan (Work in Fishing Convention)⁹⁰. Hal ini sangat di
na dalam Konvensi Tenaga Kerja Maritim terdapat hukum perli
aduan lengkap yang mengatur tenaga kerja di laut. Hal ini kemudian
da pelaku perdagangan manusia, yang apabila konvensi ini ditanda
Indonesia, akan memperberat hukuman yang diberikan pada pelaku, c

ernasional tentang pelayaran dan penangkapan ikan atau tentang k
dagangan yang telah berlaku bertahun-tahun, padahal konvensi
enting untuk perlindungan nelayan dan anak buah kapal Indonesi
kerja asing. Beberapa konvensi yang belum ditandatangani oleh
adalah Konvensi Tenaga Kerja Maritim atau MLC (Maritim
Convention), dan konvensi yang dibuat oleh ILO yaitu Konvensi
Penangkapan Ikan (Work in Fishing Convention)⁹⁰. Hal ini sangat di
na dalam Konvensi Tenaga Kerja Maritim terdapat hukum perli
aduan lengkap yang mengatur tenaga kerja di laut. Hal ini kemudian
da pelaku perdagangan manusia, yang apabila konvensi ini ditanda
Indonesia, akan memperberat hukuman yang diberikan pada pelaku, c

ernasional tentang pelayaran dan penangkapan ikan atau tentang k
dagangan yang telah berlaku bertahun-tahun, padahal konvensi
enting untuk perlindungan nelayan dan anak buah kapal Indonesi
kerja asing. Beberapa konvensi yang belum ditandatangani oleh
adalah Konvensi Tenaga Kerja Maritim atau MLC (Maritim
Convention), dan konvensi yang dibuat oleh ILO yaitu Konvensi
Penangkapan Ikan (Work in Fishing Convention)⁹⁰. Hal ini sangat di
na dalam Konvensi Tenaga Kerja Maritim terdapat hukum perli
aduan lengkap yang mengatur tenaga kerja di laut. Hal ini kemudian
da pelaku perdagangan manusia, yang apabila konvensi ini ditanda
Indonesia, akan memperberat hukuman yang diberikan pada pelaku, c

tindak lanjut seperti belum adanya dukungan di bidang lain secara signifikan untuk melindungi perairan Indonesia dan potensi kekayaan alam yang Indonesia miliki. Padahal pengembangan hukum diperlukan agar sesuai dengan hukum laut internasional dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedang beberapa konvensi telah disahkan oleh Indonesia namun kurangnya komitmen dari pemerintah Indonesia membuat hasilnya menjadi kurang. Seperti Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan Awak Kapal. Maulidiyah, seorang narasumber dari penelitian ini juga mengatakan bahwa kurangnya kerjasama dari pemerintah dan komunikasi yang tergolong lama dan tidak menjangkau publik juga menjadi penghambat kinerja kita untuk memberantas perdagangan manusia atau pada kasus ini penyelesaian perdagangan manusia yang ada di Benjina. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui juga betapa bahayanya hal tersebut bukan hanya untuk kondisi perairan Indonesia namun juga dengan hak-hak buruh secara keseluruhan. Maulidiyah, salah satu narasumber penelitian ini juga menambahkan bahwa, apabila masyarakat Indonesia ikut serta dalam pemberantasan dan penyelesaian kasus tersebut maka masyarakat di seluruh dunia juga akan menanggapi hal tersebut sehingga akan lebih mudah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dalam Bab VII tentang Kerjasama Internasional dan Peran Serta Masyarakat, menyebutkan pentingnya peran masyarakat untuk membantu pemerintah dan dapat kooperatif dalam pencegahan dan penanganan perdagangan manusia, Namun tidak nampak adanya peran serta masyarakat dalam pemecahan

C. Perdagangan Manusia Dalam Sektor Perikanan

⁹¹ FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture, 2014, hal.10.

penangkapan ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan. Selain izin penangkapan yang tidak sesuai dengan kapasitas penangkapan ikan yang jauh lebih banyak dari kuota yang tersedia, eksploitasi berlebihan dengan illegal⁹². Kurang lebih 57% stok ikan di dunia telah habis. Eksploitasi sepenuhnya, bisnis perikanan tidak lagi dapat dilindungi. Stok ikan yang tersisa adalah ikan dengan nilai penjualan rendah. FAO memprediksi bahwa 29,9% dari stok ikan di dunia telah habis. Eksploitasi berlebihan. Karna eksploitasi yang berlebihan tersisa. Selain sumber daya ikan yang juga semakin menipis maka nelayan tradisional⁹³. Mereka terpaksa mencari jalan lain untuk hidup dan menafkahi keluarganya. Yaitu dengan menjual kapal-kapal penangkapan ikan yang berlayar jauh menuju ke perairan lain. Sumber daya ikan. Karna minimnya pendidikan dan pendapatan serta tawaran akan di gaji besar, maka para nelayan tradisional menjadi anak buah kapal pada kapal penangkapan ikan. Mereka tahu bahwa di tempat kerja baru itulah mereka menjadi budak, serta kekerasan dari kapten-kapten mereka⁹⁴.

Karna persaingan perusahaan-perusahaan perikanan inilah buah kapal sering kali diberi gaji minim atau bahkan tidak

⁹² Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 38.

⁹³ FAO, 2014, The State of World Fisheries and Aquaculture, dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 37.

⁹⁴ Dennis Arnold and Kevin Hewison, "Exploitation in Global Supply Chains: Burmese Migrant Workers in Mae Sot, Thailand", dalam *Journal of Contemporary Asia* Vol. 35 No 3, (2005), 3

⁹⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 65.

[illegible]

Para korban perdagangan manusia yang berada di Benjina tertipu oleh tawaran gaji yang menggiurkan. Hal tersebut menjadi sangat menarik oleh para korban yang akhirnya mau tidak mau untuk berangkat menuju kapal penangkapan ikan karna desakan kondisi ekonomi. Mereka rela bermigrasi jauh dari wilayah negara mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Dan bekerja sebagai anak buah kapal penangkapan ikan dengan wilayah kerja berada di laut, menjadi hal yang terlihat mudah untuk di lakukan. Dan mudah pula untuk menyimpan atau menabung uang hasil gaji mereka, karna tidak ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menghabiskan uang apabila berada di laut. Itulah mengapa mereka tertarik untuk menjadi nelayan di kapal penangkapan ikan. Perbedaan nilai tukar, jumlah upah dan perbedaan keadaan ekonomi negara masing-masing juga menjadi faktor mereka, korban asal Myanmar, Laos, dan Kamboja, memilih untuk bekerja di Thailand. Perbandingan PDB (Paritas Daya Beli) antara Thailand dan negara-negara lain seperti Myanmar, Laos dan Kamboja, menunjukan bahwa PDB Thailand jauh lebih besar dari pada negara-negara tersebut⁹⁸.

⁹⁸ Jerrold W. Huugot & Sureeporn Punplung, "International Migration to Thailand", IOM Thailand, 2005, hal. 5 dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 69.

William D. Coplin mengemukakan teori tentang pembuatan kebijakan luar negeri, yang mana terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri itu sendiri. Seperti politik dalam negeri, konteks internasional, kemampuan ekonomi dan militer negara tersebut. Beberapa variabel yang dikemukakan oleh Coplin juga mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara.

Salah satu variabel yang peneliti gunakan adalah Variabel Idiosyncratic atau variabel individu yang banyak membahas mengenai karakter dan latar belakang seorang pembuat keputusan (*Decision Maker*) atau pembuat kebijakan luar negeri itu sendiri. Dalam kasus ini adalah Presiden Joko Widodo, selaku *Decision Maker*, yang karakteristik dan latar belakangnya berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Kasus Benjina

[illegible]

Sifat nasionalisme yang tinggi yang dimiliki oleh Presiden Jokowi juga mempengaruhi kebijakan yang dibuatnya. Dalam beberapa

¹⁰² Tomy Darma, Pengaruh Kebijakan Presiden Jokowi Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Cina di Natuna, *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hal 323-331

Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti bersama dengan Polisi Republik Indonesia, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia, dan Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) bekerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia dan perbudakan di PT. Pusaka Benjina Resources, Benjina, Maluku. Kebijakan baru yang dibuat oleh Presiden Jokowi nampaknya telah sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Adanya kasus benjina mempengaruhi pembuatan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Seperti teori yang dikemukakan

Sebagai upaya untuk melindungi wilayah perairannya, Presiden Jokowi juga menerapkan hukum pidana korporasi dan pendekatan multi-hukum yang menerapkan sanksi administratif berdasarkan temuan kepatuhan audit, pembentukan satuan tugas untuk memerangi kejahatan perikanan sesuai arahan Presiden dengan sistem penegakan satu atap. Membuat peta jalan untuk meningkatkan tata kelola usaha perikanan dengan komitmen kekuatan maritim “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kemakmuran”. Juga berkomitmen untuk mejadi pemerintahan yang lebih baik. Kebijakan ini juga sesuai dengan teori pengambilan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh William D. Coplin yang mana Indonesia telah membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya sebagai respon dari apa yang dilakukan oleh negara lain.

kepatuhan audit, pembentukan satuan tugas untuk mem
perikanan sesuai arahan Presiden dengan sistem pene
Membuat peta jalan untuk meningkatkan tata kelola
dengan komitmen kekuatan maritim “Kedaulatan, Ke
Kemakmuran”. Juga berkomitmen untuk mejadi pemerin
baik. Kebijakan ini juga sesuai dengan teori pengambil

[illegible]

1.2 Idiosinkratik Presiden Jokowi dalam Penanganan Pelanggan

Dalam penanganan pelanggaran HAM, selain kepemimpinan Presiden Jokowi membuktikan bahwa diri dalam penegakan hukum HAM. Dalam hasil wawancara peneliti

¹⁰⁷ Ibid, 124.

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan pula hasil penangangan HAM die era Presiden Jokowi dan di era sebelumnya, narasumber mengatakan bahwa “*Apabila dibandingkan dengan era Presiden Soeharto yang cenderung represif, di era Presiden Jokowi penuntasan pelanggaran HAM, lebih di junjung tinggi*”¹⁰⁹. Dalam kampanye Pilpres 2014 Presiden Jokowi bahkan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan menghapus impunitas. Kuasa hukum Presiden Jokowi, Mahendra mengatakan bahwa dalam era kepemimpinan Jokowi tidak ditemukan pelanggaran HAM yang berat¹¹⁰. Pernyataan itu juga dikeluarkan oleh komisioner komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Choirul Anam, juga oleh Direktur Amnesty

¹¹⁰ Benarkah Tidak Ada Pelanggaran HAM Berat Di Era Jokowi? dalam <https://tirto.id/benarkah-tak-ada-pelanggaran-ham-berat-di-era-jokowi-deBY> diakses pada 5 Agustus 2019

Penanganan kasus Benjina yang termasuk cepat dapat dikarenakan Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya intervensi dari negara-negara lain dalam upaya penyelesaiannya. Narasumber peneliti mengatakan bahwa, *“Di era Jokowi penanganan pelanggaran HAM lebih baik, tidak ramai dan menjadi viral saat penyelesaiannya. Strateginya jauh lebih bagus, meminimalisir intervensi dari negara lain”*.¹¹¹

Dalam kasus pelanggaran HAM di Benjina dan kaitannya dengan pemberantasan kejahatan perikanan lainnya, konsistensi Indonesia dalam memberantas permasalahan tersebut mendapat apresiasi dari beberapa negara. Adanya insentif ekonomi dari pasar dunia seperti AS dan Uni Eropa adalah salah satunya. Keberhasilannya dalam penegakkan HAM

¹¹² Wawancara dengan Lia, Pegawai bagian Ditjen Penanganan Pelanggaran pada 05 Agustus 2019.

Karena keberhasilannya dan komitmen tegas yang dilakukan pemerintah Indonesia di era Presiden Jokowi dalam menangani perdagangan manusia dan perbudakan di Benjina, sebanyak 300 peserta yang menghadiri Konferensi Tuna Eropa di Brussel tahun 2015 memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia. Meski begitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebutkan bahwa penyelesaian kasus ini belum menysasar pimpinan tertinggi dari perdagangan dan perbudakan ini. Namun beliau bertekat bahwa Indonesia bisa memerangi kejahatan laut dan perbudakan dengan ,mempererat kerjasama dengan regional maupun dengan negara-negara di dunia secara keseluruhan.

[illegible]

PENUTUP

Di Indonesia yang terjadi adalah kasus perbudakan nelayan dan anak buah kapal (ABK) yang bekerja pada PT. Pusaka Benjina Resources. Perdagangan manusia dengan tujuan yang lebih spesifik untuk dipekerjakan paksa di kapal-kapal penangkapan ikan di Benjina adalah salah satu kasus yang berhasil dipecahkan oleh Indonesia.

Presiden Jokowi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Polisi Republik Indonesia, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia, dan Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) bekerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia dan perbudakan yang terjadi di PT. Pusaka Benjina Resources. Kebijakan yang dikeluarkan seperti: (1) Menetapkan 8 orang sebagai tersangka pelaku perdagangan manusia, masing-masing terdakwa bersalah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp.160.000.000; atau menjalani tambahan 6 bulan penjara, dan untuk kapten denda sebesar Rp. 773.000.000; untuk kompensasi terhadap para awak kapal yang menjadi korban. (2) Mencabut dan membekukan surat ijin penangkapan ikan (SIPI), surat ijin usaha perikanan (SIUP), surat ijin kapal pengangkut ikan (SIKPI), dan mengeluarkan surat-surat peringatan karna telah melakukan pelanggaran peraturan perikanan.

Beberapa faktor seperti level individu Presiden Jokowi selaku *decision makers*, *level system* sebagai konteks internasional yang mendorong, dan kemampuan ekonomi dan geografi Indonesia. Beberapa hal tersebut kemudian mempengaruhi pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Beberapa konvensi yang belum ditandatangani oleh Indonesia mengurangi proses hukum yang selarasnya dapat dilakukan dalam pemecahan kasus ini. Namun beberapa di antaranya telah ditandatangani dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Beberapa dinamika yang terjadi dalam pemecahan kasus perdagangan manusia dan perbudakan di Benjina disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia dan alat yang dimiliki. Kurangnya komitmen untuk bekerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia dan kurangnya komunikasi antara pihak yang berwenang mengakibatkan proses yang berjalan lamban. Oleh karenanya saran yang dapat diberikan oleh penulis, pemerintah Indonesia untuk lebih berkomitmen pada kejahatan perikanan dan yang berkaitan dengan kejahatan perikanan, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya dapat bersama-sama melindungi perairan Indonesia yang akan berdampak pada kekuatan nasional.

Buku

Sefriani, Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer,
Jakarta: PT.RajaGraffindo Persada, 2016

Sugiyono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2010

Sumadi Suryabrata. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali, 1987.

Soerapto,R. , Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997)

Zhang & S. Pineda, *Corruption as a Casual Factor in Human Trafficking in Organised Crime: Culture Market and Policies* (D. Siegel & H. Nelen eds., 2008).

Jurnal

Attina Fulvio , International Relations and Comtemporany World Issues. Vol II.
Department of Political Studies, University of Catania, Italy.

Mutaqin Zezen: Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai Fishing Industry. *Journal of East Asia and International Law*. May 2018. ResearchGate

Sixty-seventh General Assembly Third Committee Meeting, “Heinous, Fast-Growing Crimes of Human, Drug Trafficking Will Continue to Ravage World”s Economics without Coordinated Global Action, Third Committee Told”, press release, 11 Oktober 2012

EFJ, The Continued Plight of Trafficked Migrants , *supra* note 14. *See* also FAO , The State of Fisheries and Aquaculture 71 (2012); AP, *supra* note 11

Greenpeace, *supra* note 9.

Thai Anti-Human Trafficking Action, *supra* note 87.

Benni Yusriza, *The Narrative Unfree Labour: Analysing Labour Dynamics of Products Networks in The Case of Trafficked Fisherman in Maluku, Indonesia*, (Lund University, 2016)

Website

Maxwell School website. <https://www.maxwell.syr.edu/paf.aspx?id=548>

Thai Anti-Human Trafficking Action, The New Fisheries Act, Jan. 15, 2015,
<http://www.thaiantihumantraffickingaction.org/Home/?p=457>

Thailand Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008) [Thailand], 30 January 2008,
<http://www.refworld.org/docid/4a546ab42.html>

CNN Indonesia pada Juni 2019
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150408165729-95-45142/data-dan-fakta-pusaka-benjina-resources-versi-pemerintah>

Sekretariat Kabinet, Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014, di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014. Dalam <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-pembukaan-rakornas-kabinetkerja-2014-di-istana-negara-jakarta-4-november-2014/>

Perundang-Undangan

United Nations, 1996, *United Nations Human Rights Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery*, Raoul Wallenberg Institute, Lund, Sweden

2000 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

United Nations Convention against Transnational Organized Crime diadopsi berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/55/25 tanggal 15 November 2000

Protocol Amending The Slavery Convention signed at Geneva on 25 September 1926

Supplementary Convention on The Abolition of Slavery, The Slave Trade, and
Institutions and Practice similar to Slavery

Forced Labour Convention, 1930 (no.29)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (no.105)

Convention for The Suppression of The Traffic in Persons and of The Exploitation of The Prostitution of others

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

International Convention on The Protection of The Right of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICPMW)

Protocol Against the Smuggling of Migrant by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

Konvensi ILO Nomor 95 Tahun 1949 tentang Perlindungan Upah

Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949 tentang Migrasi untuk Bekerja, yang antara lain mengatur tentang Standar Rekrutmen dan Kondisi Kerja Buruh Migran

Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975 tentang Buruh Migran

Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982 dan diberlakukan pada 16 November 1994

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Orang

Undang-Undang nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

